

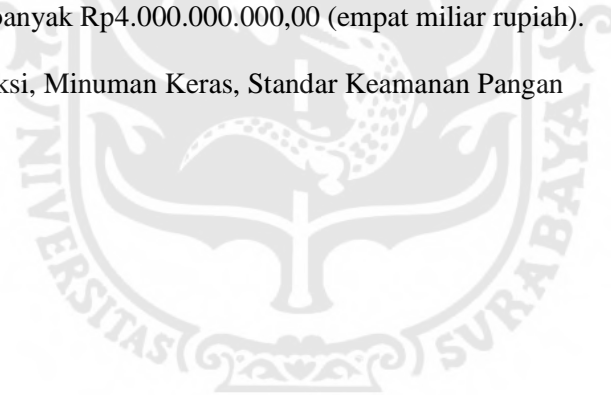
JUDUL : PRODUKSI MINUMAN KERAS LOKAL YANG TIDAK MEMENUHI
STANDAR KEAMANAN PANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Nama : Jose Christofer
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing :
1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Erly Aristo S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Undang-Undang Pangan secara filosofis dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Ada beberapa perbuatan dalam Undang-Undang ini yang termasuk tindak pidana diantaranya tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan. Memproduksi minuman keras yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, maka dari itu apabila terjadi pelanggaran seperti itu, pelaku dapat diberikan sanksi pidana, yaitu Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Kunci: Produksi, Minuman Keras, Standar Keamanan Pangan



TITLE : LOCAL LIQUOR PRODUCTION THAT DID NOT FULFILL THE FOOD
SAFETY STANDARDS VIEWED FROM LAW NUMBER 18 OF 2012
CONCERNING FOOD

Name : Jose Christofer
Dicipline/Study Programme : Law/Legal Studies
Contributor :
1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Erly Aristo S.H., M.Kn.

ABSTRACT

The Food Law was philosophically formed to carry out basic human needs, and its fulfilment is part of the human rights guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a fundamental component for creating an adequate quality of human resources. Therefore, the state is obliged to realize the availability, affordability, and fulfilment of sufficient, safe, qualified, and nutritionally balanced food consumption. Those factors must meet on both at the national and regional to individual levels evenly throughout the Unitary State of the Republic of Indonesia by utilizing resources, institutions, and local culture. There are several acts in this law which include criminal acts, for instance not fulfilling the Food Safety Standards. Producing liquor that is not following food safety standards is one of the crimes regulated in the law. Wherefore, if such a violation occurs, the perpetrator can be given a criminal sanction, namely imprisonment for a maximum of 2 (two) years or a fine of up to 4,000,000,000.00 (four billion rupiah).

Keywords: *Production, Liquor, Food Safety Standards*